



Buletin Parlementaria



3 Tingkatkan Kepedulian dan Gotong Royong



4 RI dan Tiongkok Bahas Peluang Investasi Kereta Cepat IKN



Pembangunan Wilayah Perbatasan Jadi Perhatian



Timwas Haji Minta Selidiki Pengalihan Setengah Kuota Tambahan

Nomor 1299/1/VII/2024 Juli 2024



9 772614 339005



DPR Bentuk Pansus Evaluasi Penyelenggaraan Haji



DPR Bentuk Pansus Evaluasi Penyelenggaraan Haji

Pengawas (Timwas) Haji DPR RI menyampaikan rencana pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk mengevaluasi penyelenggaraan haji tahun ini. Ketua Timwas Haji DPR, Abdul Muhaimin Iskandar atau yang kerap Gus Muhaimin, menyampaikan bahwa banyak catatan dan temuan yang memerlukan penanganan khusus agar menjadi perbaikan di tahun berikutnya.

"Banyak sekali catatan-catatan oleh timwas dan sudah diramu. Semua catatan dan temuan akan kita bahas khusus melalui panitia khusus (pansus)," ujar Gus Muhaimin di salah satu pemondokan jemaah haji Indonesia, Makkah, Arab Saudi, Jumat (14/6).

Gus Muhaimin menegaskan bahwa Pansus akan mendalami lebih lanjut berbagai temuan terkait penyelenggaraan haji. Menurutnya, penelusuran akan difokuskan pada kesalahan manajemen untuk memastikan adanya perbaikan di masa depan.

"Pansus akan menelisik semua fenomena manajemen yang



Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI saat mengecek kesiapan fasilitas bagi jemaah haji Indonesia di Arafah, Makkah, Arab Saudi, Kamis (13/06/2024).

mengalami kesalahan dan kekurangan untuk perbaikan haji yang akan datang," tambah Politisi Fraksi PKB ini.

Salah satu masalah yang disorot oleh Gus Muhaimin adalah terkait konsumsi jemaah haji. Ia

mengungkapkan bahwa bahan pangan untuk jemaah Indonesia didatangkan dari Thailand, yang menurutnya seharusnya menjadi kesempatan bagi pelaku usaha nasional.

"Salah satunya agak mendasar bahan pokok konsumsi semua impor Thailand, padahal jumlah jemaah kita 241 ribu (orang) lebih. Itu mestinya jadi kesempatan para pelaku nasional untuk mensuplai kebutuhan pangan, bukan justru impor Thailand," kata Gus Muhaimin.

Gus Muhaimin menekankan pentingnya adanya negosiasi yang kuat antara pemerintah Indonesia dan Arab Saudi untuk mengatasi masalah ini. Keinginan membawa isu penyelenggaraan haji ke pansus DPR, menurutnya, sudah disepakati bersama oleh anggota Timwas Haji lainnya. **skr/rdn**



FOTO: SCH/ANDRI

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily saat melakukan pengawasan haji 2024 di Makkah, Arab Saudi, Senin (24/06/2024).



Tingkatkan Kepedulian dan Gotong Royong di Momen Iduladha



Ketua DPR RI Puan Maharani.

Ketua DPR RI Puan Maharani mengucapkan selamat merayakan Iduladha 1445 Hijriah kepada seluruh masyarakat Indonesia. Ia pun mengajak masyarakat untuk memaknai Hari Raya Iduladha 2024 dengan semangat gotong royong, sekaligus sebagai momen untuk meningkatkan kepedulian kepada sesama.

“Selamat Idul Adha 1445 Hijriah kepada seluruh umat Islam. Lewat semangat Iduladha, mari kita tingkatkan gotong royong, dan kepedulian untuk membantu sesama, terlebih bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan,” kata Puan dalam keterangan tertulisnya, Senin (17/6).

Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini juga menilai, Iduladha dapat menjadi momen untuk memperkuat rasa solidaritas dan persaudaraan antar-umat beragama. Menurut Puan, solidaritas sangat dibutuhkan di tengah banyaknya tantangan yang dihadapi bangsa.

“Selain sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT atas rasa syukur dan untuk meningkatkan iman dan takwa, memberi kurban di hari raya Iduladha dapat menjadi simbol keikhlasan dalam berbagi untuk sesama,” ujarnya. Puan berharap, umat Muslim di Tanah Air dapat semakin meningkatkan iman dan takwa kepada Allah SWT di momen Idul Adha. **aha**

Scan QR untuk berita selengkapnya



PENGAWAS UMUM
Pimpinan DPR RI

KETUA PENGARAH
Ir. Indra Iskandar, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI)

WAKIL PENGARAH
Suprihartini S.I.P., M.Si (Deputi Bidang Persidangan)

PIMPINAN PELAKSANA
Dr. Indra Pahlevi, S.I.P., M.Si. (Karo Pemberitaan Parlemen)

PIMPINAN REDAKSI
M. Ibnurkhalid, S.Pd. (Kabag Media Cetak)

WAKIL PIMPINAN REDAKSI
Rizka Arinindya, S.Sos. (Kasubag Media Cetak dan Website)
Agus Budi Leksono, S.A.P. (Kasubag Analisis Media)
Nita Juwita, S.Sos. (Kasubag Media Sosial)

REDAKTUR
Agung Hidayat, S.I.P., Ridwan Budiman, S.I.P., Muhammad Husen

REDAKTUR FOTO
M. Andri Nurdiansyah

SEKRETARIS REDAKSI
Fadlun Bariyah, Prima Danutirto, A.Md,
Andi Nurul Nauval Ramadhina, A.Md.S

ANGGOTA REDAKSI
Tiara Saum, S.I.Kom, Hira Askamal, S.I.Kom, Bianca Destianti, S.I.Kom,
Yhusanti Pratiwi Sayogo, S.I.Kom, Wilga Emilson, S.Sos.,
Ananda Galuh Pawestri, S.I.Kom, Naden Ivan, S.I.Kom.,
Ubad Faurizal, S.I.Kom, Shane Savera Sa'diyah, S.I.Kom., Rahayu
Setyowati, Ria Nur Mega, Devi Iriandi, Surahmat Eko Budi Setianto,
Taufan Syahrulli, Puntho Pranowo, Singgih Kinanti Rimbani, Siti
Nadiyah, Nafisa Hanum Alaydrus, Bunga Leonnaricha Firsta Dysie,
Balggy Maeshyntha, Anju Alfonso Sitomput, Zulfikar Mubien

FOTOGRAFER
Naefuroji, Jaka Nugraha, Runi Sari Budlanti, Arief Rachman,
R. Kresno PD. Moempoeni, Azka Restu Alfdhillah, Gerald Opie,
Hasri Mentari, Friederick Munchen

ANALIS MEDIA
Supian, S.E, Larissa Amanda Indianti Siahaan, S.I.P,
Eki Baehaki, S.Sos, M. Rizki Ramadhani, S.I.Kom, M. Rizki Nugraha,
Sunarya, Fahmi Harfa, Safitri Restu Widayati, Rosnita,
Yoga Achmad Fauzan, Intan Putri Suciani, Riska

INFOGRAFIS
Tiara Annisa, Chasbi Chusna Mulia, Dipa Natalio, Aisyah Salmah,
Dewa Pratama, Estu Mega Nurjanah Putri

ADMINISTRASI
Suhendi, Lutfi Suci Nur'aini, Damar Maulana Taher, Fitrianto

PENERBITAN

PIMPINAN PENERBITAN
Djoko Hanggoro, S.T. (Kabag Penerbitan)

PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI
Mediantoro, S.E. (Kasubag Produksi)

DESAIN GRAFIS
Dito Sugito, Ihsan Syahrevi, Aan Risdiana, M.Kom

IT MEDIA DIGITAL
Muhamad Hendar Assifa, S.Kom, Savant Rifqi Hidayat, S.E.

PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI
M. Chairudin, S.Sos. M.M. (Kasubag Distribusi)

KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI
Zulfikar, S.A.B.

ADMINISTRASI

STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI
Handhal Dwi Akbar, Nabila Khairunissa, Made Chrinsa Dwipa

Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421
Email : bag_penerbitan@dpr.go.id

**ISI BERITA DAN MATERI FOTO
DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN**

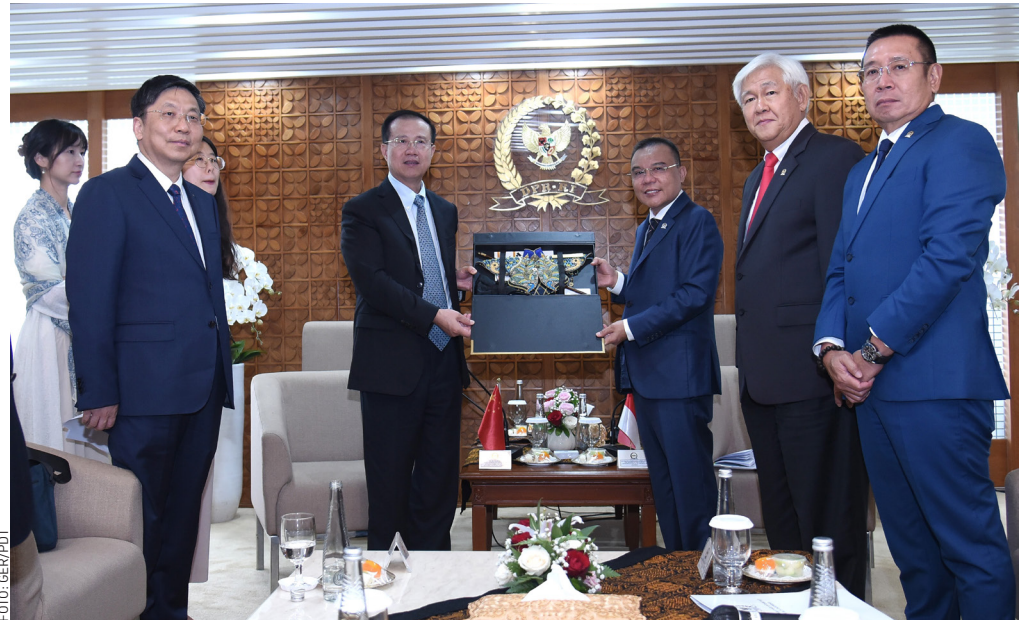
**HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK
PERMINTAAN HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)**

RI dan Tiongkok Bahas Peluang Investasi Kereta Cepat IKN

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menerima Delegasi Komisi Luar Negeri Lembaga Legislatif Tertinggi Republik Rakyat Tiongkok (*National People Congress/NPC*). Dalam pertemuan ini, kata Dasco, dibahas juga mengenai berbagai peluang kerja sama kedua negara, termasuk di antaranya mengenai investasi kereta cepat di Indonesia.

"Menurut saya, apa yang tadi disampaikan untuk kereta cepat kita apresiasi, tentunya kita akan membuka kesempatan yang lebih luas di trayek-trayek yang lain," kata Dasco kepada **Parlementaria** usai pertemuan di Gedung Nusantara III, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (12/6).

Politisi Fraksi Partai Gerindra ini menerangkan, bahwa kemungkinan investasi kereta cepat berlanjut masih ada, termasuk juga untuk diterapkan di IKN. Namun demikian, hal tersebut,



Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad saat bertukar cenderamata usai menerima Delegasi Komisi Luar Negeri Lembaga Legislatif Tertinggi Republik Rakyat Tiongkok (*National People Congress/NPC*) di Gedung Nusantara III, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (12/6/2024).

kata Dasco, masih membutuhkan kajian mendalam.

"Misalnya Jakarta-Surabaya atau yang di mana, nanti tergantung

dari studi yang perlu dibuat. Termasuk tadi kita minta supaya ada semacam transportasi sejenis di IKN," kata Legislator Dapil Banten III ini.

Lebih lanjut, Dasco mengatakan dalam pertemuan tersebut lebih banyak membahas hubungan bilateral kedua negara, hubungan kerja sama di masa saat ini dan di masa yang akan datang.

"Kemudian tadi juga membicarakan isu-isu global termasuk isu yang saat ini sedang tren yaitu isu tentang Palestina tentunya. Dan kita sepakat bahwa kerja sama di masa depan akan terjadi, ditingkatkan menjadi lebih baik. Dan kemudian apa yang sudah ada sekarang akan dilanjutkan," katanya. **we**

DI DALAM DIRI KITA ADA TANGGUNG JAWAB TERHADAP DIRI KITA SENDIRI MAUPUN SEBAGAI KHALIFAH DI MUKA BUMI. ADA JUGA TANGGUNG JAWAB BAGI KITA UNTUK BERKIPRAH DALAM MEWARNAI KEHIDUPAN UMAT, MASYARAKAT BANGSA DAN NEGARA.

Sufmi Dasco Ahmad

Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan (Korekku)

Scan QR untuk berita selengkapnya



Pembangunan Wilayah Perbatasan Jadi Perhatian

Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang) Rachmat Gobel meminta Pemerintah agar tidak mengurangi perhatiannya dalam pembangunan di daerah perbatasan. Karena masyarakat daerah perbatasan memiliki hak yang sama atas janji kemerdekaan Indonesia, kemajuan dan kesejahteraan mereka juga menjadi perhatian tugas negara.

“Walau kondisi keuangan tidak dalam keadaan yang longgar, sesuai dengan visi Presiden Joko Widodo untuk membangun Indonesia dari pinggiran, maka DPR meminta kepada pemerintah agar pembangunan daerah perbatasan tidak kendor. Tetap *gas pol*,” kata Gobel di Jakarta, Selasa (11/6).

Selaku Ketua Tim Pengawas Pembangunan Daerah Perbatasan DPR RI (Timwas Perbatasan) Gobel menyatakan, ada sejumlah langkah agar pembangunan daerah perbatasan tetap lancar. Di



FOTO: AZK/PDT

Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang) Rachmat Gobel.

antaranya yakni, *pertama* efisiensi anggaran agar roda pembangunan di daerah perbatasan tetap berjalan

sebagaimana mestinya. *Kedua*, melakukan optimalisasi anggaran agar hasil pembangunan tidak mengendur.

Ketiga, tetap memberikan prioritas terhadap pembangunan daerah perbatasan. Keempat, anggaran pembangunan wilayah perbatasan yang ditempatkan di kementerian dan lembaga jangan digunakan untuk keperluan lainnya.

“DPR sudah memberikan persetujuan terhadap anggaran pembangunan daerah perbatasan. Karena itu walau di tengah situasi yang berat, DPR meminta kepada pemerintah agar melakukan efisiensi dan optimalisasi anggaran di kementerian dan lembaga agar pembangunan di daerah perbatasan tetap lancar,” katanya.

[gal/rdn](#)

WALAU KONDISI KEUANGAN TIDAK DALAM KEADAAN YANG LONGGAR, SESUAI DENGAN VISI PRESIDEN JOKO WIDODO UNTUK MEMBANGUN INDONESIA DARI PINGGIRAN, MAKA DPR MEMINTA KEPADA PEMERINTAH AGAR PEMBANGUNAN DAERAH PERBATASAN TIDAK KENDOR. TETAP GAS POL.

Rachmat Gobel

Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang)

Scan QR untuk berita selengkapnya



Timwas Haji Minta Selidiki Pengalihan Setengah Kuota Tambahan

Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI, Luluk Nur Hamidah, mengungkapkan kekecewaannya terhadap keputusan pemerintah mengalihkan setengah dari kuota tambahan haji sebanyak 20.000 orang kepada haji plus tanpa konsultasi dengan DPR. Menurutnya, perubahan ini seharusnya melibatkan dialog dan pertimbangan dari DPR agar keputusan yang diambil lebih komprehensif.

"Kami mendengar alasan pemerintah mengenai perubahan sistem di Arab Saudi yang menyebabkan pengalihan setengah kuota 20.000 ini untuk haji plus. Namun, sangat disayangkan karena tidak dikonsultasikan dengan DPR. Apa susahnyanya membuka ruang dialog dan membicarakan ini bersama-sama?" kata Luluk, di Makkah, Rabu malam (19/6).

Luluk menekankan bahwa dalam mengambil keputusan, pemerintah seharusnya tetap mempertimbangkan masukan dari DPR,



Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI, Luluk Nur Hamidah, saat mengecek bahan baku makanan penyedia katering jemaah Haji Indonesia di Makkah, Arab Saudi.

terutama terkait undang-undang dan kesepakatan yang telah dibuat bersama Kementerian Agama (Kemenag).

"Pemerintah tidak berada di posisi yang aktif dalam hal penyesuaian atau sistem *E-Haji* yang diluncurkan oleh Arab Saudi. Hal ini seharusnya disampaikan oleh Kemenag agar kami di DPR juga bisa memahami perubahan yang terjadi," tambahnya.

Lebih lanjut, Luluk menyoroti kurangnya informasi yang diterima DPR mengenai negosiasi yang dilakukan oleh Kemenag. "Jika Kemenag mentok dalam negosiasi, kami perlu tahu. Namun, yang terjadi sekarang, kami tidak mendapatkan informasi apa pun. Ini berarti pemerintah sengaja mengambil keputusan sepihak," tegasnya. **skr/aha**



KAMI MENDENGAR ALASAN PEMERINTAH MENGENAI PERUBAHAN SISTEM DI SAUDI ARABIA YANG MENYEBABKAN PENGALIHAN SETENGAH KUOTA 20.000 INI UNTUK HAJI PLUS. NAMUN, SANGAT DISAYANGKAN KARENA TIDAK DIKONSULTASIKAN DENGAN DPR. APA SUSAHNYA MEMBUKA RUANG DIALOG DAN MEMBICARAKAN INI BERSAMA-SAMA?

Luluk Nur Hamidah

Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI

Scan QR untuk berita selengkapnya



Beberkan Alasan Perlunya Dibentuk Pansus Haji

Tim Pengawas Penyelenggaraan Haji DPR RI menilai penyelenggaraan haji tahun 2024 menyisakan banyak persoalan. Karena itu, anggota Timwas DPR RI Wisnu Wijaya mengusulkan agar dibentuk panitia khusus (pansus) mengevaluasi dan memperbaiki penyelenggaraan haji.

Wisnu menjelaskan setidaknya ada tiga alasan mengapa perlu dibentuk Pansus Haji. Alasan pertama, banyaknya persoalan yang menyelimuti penyelenggaraan haji 2024. Pelayanan haji yang buruk meliputi pemondokan, katering, tenda, akses air dan toilet, kesehatan, dan transportasi yang berulang setiap tahun yang tidak hanya mendera jemaah haji reguler, tetapi juga jemaah haji khusus.

"Ironisnya, sebagai penyumbang jumlah jemaah haji terbesar di dunia yang pastinya menguntungkan secara ekonomi bagi Arab Saudi, Pemerintah Indonesia dinilai gagal memanfaatkan



FOTO: SKR/PIOT

Anggota Timwas DPR RI Wisnu Wijaya saat melakukan pengawasan haji 2024 di Arafah, Arab Saudi, Sabtu (15/6/2024).

aspek tersebut sebagai nilai tawar ini untuk melakukan diplomasi agar Pemerintah Arab Saudi bisa memberikan layanan yang lebih baik bagi jemaah kita dibanding negara lain.

Sebagai contoh, Korea dan Jepang sebagai negara minoritas muslim yang tidak banyak menyumbang jemaah haji justru mendapat fasilitas yang jauh lebih baik dalam hal pemondokan misalnya," papar Wisnu di Makkah, Kamis (20/6).

Anggota Komisi VIII DPR RI itu menganggap pemerintah tidak siap dengan kuota haji tambahan dari Pemerintah Arab Saudi. Hal ini terbukti dengan ketidakmampuan mereka menyediakan fasilitas pelayanan yang sepadan dengan banyaknya jumlah jemaah. "Temuan di lapangan, misalnya banyak jemaah yang terlantar akibat kapasitas tenda-tenda Arafah dan Mina tidak memadai untuk menampung jemaah. Ketersediaan antara fasilitas dan jumlah jemaah yang tidak berimbang juga berdampak pada buruknya layanan transportasi, akses air dan toilet," ungkapnya. **skr/aha**



IRONISNYA, SEBAGAI PENYUMBANG JUMLAH JEMAAH HAJI TERBESAR DI DUNIA YANG PASTINYA MENGUNTUNGKAN SECARA EKONOMI BAGI ARAB SAUDI, PEMERINTAH INDONESIA DINILAI GAGAL MEMANFAATKAN ASPEK TERSEBUT SEBAGAI NILAI TAWAR INI UNTUK MELAKUKAN DIPLOMASI AGAR PEMERINTAH ARAB SAUDI BISA MEMBERIKAN LAYANAN YANG LEBIH BAIK BAGI JEMAAH KITA DIBANDING NEGARA LAIN. SEBAGAI CONTOH, KOREA DAN JEPANG SEBAGAI NEGARA MINORITAS MUSLIM YANG TIDAK BANYAK MENYUMBANG JEMAAH HAJI JUSTRU MENDAPAT FASILITAS YANG JAUH LEBIH BAIK DALAM HAL PEMONDOKAN MISALNYA.

Wisnu Wijaya

Anggota Tim Pengawas [Timwas] Haji DPR RI

Scan QR untuk berita selengkapnya



Fasilitas Jemaah Haji Tak Mencukupi

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily, melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) ke maktab 72 di Mina untuk memantau kondisi jemaah haji Indonesia. Dalam kunjungan tersebut, Ace menyambangi JKS 10 dari Kabupaten Bandung Barat, JKS 11 dari Kabupaten Bogor, dan bertemu dengan ketua kloter dari SUB 103. Dari hasil pengawasan yang dilakukan, Ace mencatat beberapa permasalahan penting yang perlu mendapatkan perhatian serius.

Pertama, Ace menyoroti masalah kelebihan kapasitas yang masih terjadi dan mengganggu kenyamanan para jemaah selama di Mina. "Di JKS 11, yang seharusnya menampung 440 jemaah, ternyata hanya memiliki kapasitas sekitar 380 orang. Akibatnya, sekitar 50 jemaah harus dipindahkan ke tenda lain," ungkap Ace kepada **Parlementaria**, di Mina,



Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily melakukan Sidak ke tenda jemaah haji Indonesia di Mina, Makkah, Senin tengah malam waktu Arab Saudi (17/06/2024).

Makkah, Senin tengah malam waktu Arab Saudi (17/6).

Kedua, terkait dengan ketersediaan MCK (Mandi, Cuci, Kakus) yang masih sangat terbatas. Ace menyebutkan bahwa pada waktu-waktu tertentu,

terutama menjelang salat, jemaah harus mengantre cukup panjang untuk menggunakan fasilitas MCK. "Bahkan, kami temukan beberapa jemaah terpaksa buang air kecil di luar toilet, yang tentu saja mengganggu kenyamanan," ujar Politisi Fraksi Partai Golkar ini.

Ketiga, Ace menyoroti kesulitan yang dihadapi oleh jemaah lansia dalam mengakses tenda yang harus dinaiki dengan tangga. "Di maktab 72, tenda JKS 10 dan JKS 11, jemaah lansia mengalami kesulitan untuk naik tangga. Hal ini perlu menjadi perhatian untuk menciptakan haji yang ramah lansia," kata Ace.

Selain itu, Ace juga menyinggung masalah ketersediaan makanan. Meskipun sudah ada perbaikan, masih banyak keluhan terkait menu makanan. Ace berharap, DPR dan pemerintah dapat memastikan pengadaan konsumsi yang beragam dan sesuai dengan cita rasa Nusantara. **sdr/rdn**



- DI JKS 11, YANG SEHARUSNYA MENAMPUNG 440 JAMAHAH, TERNYATA HANYA MEMILIKI KAPASITAS SEKITAR 380 ORANG. AKIBATNYA, SEKITAR 50 JAMAHAH HARUS DIPINDAHKAN KE TENDA LAIN.

- BAHKAN, KAMI TEMUKAN BEBERAPA JAMAHAH TERPAKSA BUANG AIR KECIL DI LUAR TOILET, YANG TENTU SAJA MENGGANGGU KENYAMANAN.

- DI MAKTAB 72, TENDA JKS 10 DAN JKS 11, JAMAHAH LANSIA MENGALAMI KESULITAN UNTUK NAIK TANGGA. HAL INI PERLU MENJADI PERHATIAN UNTUK MENCIPTAKAN HAJI YANG RAMAH LANSIA.

Ace Hasan Syadzily

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI

Scan QR untuk berita selengkapnya



Serukan Doa untuk Masyarakat Palestina

Ketua Komisi VIII DPR RI sekaligus Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI Ashabul Kahfi menyerukan segenap pihak untuk bersama mendoakan masyarakat Palestina terbebas dari segala fitnah dan keburukan. Seruan tersebut di tengah-tengah momentum perayaan Idul Adha 1445 H/2024 M dan puncak Ibadah Haji.

Menurutnya seluruh masyarakat bisa berdoa, bermuhasabah, dan berzikir di hari yang mulia ini, demi kebebasan umat Islam di Timur Tengah tersebut yang sedang diterpa masalah kemanusiaan.

“Saya juga mengajak kepada kita semua untuk mendoakan secara khusus dan khusus bagi saudara-saudara kita di tanah suci Palestina,” kata Ashabul di Makkah, Arab Saudi, Senin (17/6).

Selain itu, ia juga berharap agar bangsa Israel diberikan hidayah untuk menghormati nilai-nilai kemanusiaan dan menghentikan



FOTO: SKR/PDT

Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi saat bertermu Menteri Agama Yaquut Cholil Qoumas dalam rangka pengawasan haji 2024 di tenda haji Indonesia, Arafah, Sabtu (15/6/2024).

kekerasan terhadap rakyat Palestina. “Diberikan hidayah kemanusiaan agar menghormati dan menghargai

arti nilai kemanusiaan sehingga tidak melakukan perlakuan keji pada masyarakat Palestina,” kata Politisi Fraksi PAN ini.

Selain itu, ia juga menekankan agar masyarakat mendoakan keselamatan jemaah haji Indonesia yang kini tengah melaksanakan puncak ibadah haji. Ia berharap jemaah Indonesia bisa melaksanakan seluruh rangkaian haji hingga kembali ke tanah air dengan selamat.

“Mari kita mendoakan secara khusus agar seluruh jemaah haji kita yang sedang berkumpul di Padang Arafah diberikan kekuatan dan kesehatan sehingga mampu menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah haji,” tutupnya.

rdn



SAYA JUGA MENGAJAK KEPADA KITA SEMUA UNTUK MENDOAKAN SECARA KHUSUS DAN KHUSYU BAGI SAUDARA-SAUDARA KITA DI TANAH SUCI PALESTINA. SAYA JUGA BERHARAP AGAR BANGSA ISRAEL DIBERIKAN HIDAYAH UNTUK MENGHORMATI NILAI-NILAI KEMANUSIAAN DAN MENGHENTIKAN KEKERASAN TERHADAP RAKYAT PALESTINA. DIBERIKAN HIDAYAH KEMANUSIAAN AGAR MENGHORMATI DAN MENGHARGAI ARTI NILAI KEMANUSIAAN SEHINGGA TIDAK MELAKUKAN PERLAKUAN KEJI PADA MASYARAKAT PALESTINA.

Ashabul Kahfi

Ketua Komisi VIII DPR RI

Scan QR untuk berita selengkapnya



Perlu Pertegas Larangan Haji Backpacker

Pemerintah Arab Saudi kini menjadikan Haji bukan lagi semata ibadah ritual, melainkan pula sebagai wisata religi. Dampaknya, haji menjadi salah satu sumber pemasukan devisa bagi negara tersebut yang alokasi tiap tahunnya benar-benar diperketat, termasuk hanya bisa diakses melalui visa haji.

Selain sebagai bentuk wisata religi, pengetatan jemaah haji ini juga sebagai bentuk agar tidak membludaknya jemaah haji tiap tahun. Keteraturan tersebut diperlukan untuk mengurangi dampak negatif yang kerap timbul ketika penyelenggaraan haji berlangsung, seperti tragedi Terowongan Mina beberapa tahun lalu.

Karena itu, Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI, Selly Andriany Gantina, menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap fenomena haji *backpacker* serta penguatan proses keimigrasian oleh pemerintah



FOTO: SKR/PDT

Anggota Timwas Haji DPR RI, Selly Andriany Gantina saat ditemui Parlementaria disela-sela melakukan pengawasan haji 2024 di Mina, Makkah, Arab Saudi, Minggu (16/6/2024).

Indonesia. Hal ini disampaikan Selly terkait perubahan pola kebijakan pemerintah Saudi Arabia mengenai haji dan umrah tersebut.

“Merasakan bahwa haji

backpacker ini juga merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Saudi Arabia. Hari ini, pemerintah Saudi Arabia telah melakukan perubahan tentang pola keuangan mereka, di mana haji dan umrah menjadi salah satu upaya mereka untuk mempromosikan wisata religi, bukan lagi semata-mata fokus pada ibadah,” ujar Selly kepada **Parlementaria**, di Mina, Makkah, Minggu (16/6).

Menurut Selly, perubahan ini mengharuskan pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah-langkah tegas dalam mengatur dan mengawasi keberangkatan jemaah haji dan umrah, terutama yang memilih jalur mandiri (*backpacker*). Ia menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antara Keimigrasian dan Kementerian Agama untuk membahas hal itu.

rdn



MERASAKAN BAHWA HAJI *BACKPACKER* INI JUGA MERUPAKAN KEBIJAKAN YANG DIKELUARKAN OLEH PEMERINTAH SAUDI ARABIA. HARI INI, PEMERINTAH SAUDI ARABIA TELAH MELAKUKAN PERUBAHAN TENTANG POLA KEUANGAN MEREKA, DI MANA HAJI DAN UMRAH MENJADI SALAH SATU UPAYA MEREKA UNTUK MEMPROMOSIKAN WISATA RELIGI, BUKAN LAGI SEMATA-MATA FOKUS PADA IBADAH.

Selly Andriany Gantina

Anggota Timwas Haji DPR RI

Scan QR untuk berita selengkapnya



Bantu Jemaah Lansia Tersesat

Ada momen yang tak biasa terjadi saat Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI, Endang Maria Astuti, menjalankan rangkaian ibadah haji. Momen itu terjadi saat Endang Maria akan melakukan lempar jamrah Aqoba di Jamarat, Makkah, Arab Saudi, Minggu (16/6).

Saat bersiap melakukan lempar jamrah, Endang terlihat menghampiri seorang lansia yang tampak kebingungan dan mencari-cari sesuatu di tengah kerumunan jemaah.

Lansia tersebut kebingungan lantaran tersesat dan sedang mencari rombongannya. Endang melihatnya tampak semakin panik. Dengan penuh empati, Endang mendekatinya dan mencoba mencari tahu identitas serta kontak yang bisa dihubungi. Sayangnya, tidak ada informasi yang dapat membantu menghubungi keluarganya.

Politisi Fraksi Partai Golkar itu kemudian berusaha mencari petugas haji Indonesia di sekitar lokasi lempar jamrah, namun tidak menemukan satupun yang berjaga. Ketika akhirnya



FOTO: SKR/PDT

Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI, Endang Maria Astuti saat membantu jemaah haji yang tersesat untuk dibawa ke posko petugas haji Indonesia, di Jamarat, Makkah, Arab Saudi, Minggu (16/06/2024).

bertemu petugas, mereka justru mengarahkan ke tempat lain tanpa memberikan solusi yang jelas.

Merasa prihatin dengan situasi ini, Endang memutuskan untuk menyelesaikan lempar jamrah

terlebih dahulu dan kemudian membawa lansia tersebut ke posko petugas haji Indonesia agar mendapat penanganan yang tepat.

Dalam perjalanan menuju posko, keberuntungan berpihak pada mereka. Endang dan lansia tersebut bertemu dengan petugas haji Indonesia yang langsung memberikan bantuan. Petugas tersebut segera menangani lansia tersebut dan mengarahkannya untuk dipertemukan kembali dengan rombongannya.

Kejadian ini menyoroti pentingnya peran dan kepedulian dari para pengawas dan petugas haji dalam memastikan keselamatan dan kenyamanan para jemaah, terutama mereka yang lanjut usia dan rentan tersesat di tengah keramaian.

skr/rdn

MERASA PRIHATIN DENGAN SITUASI INI, ENDANG MEMUTUSKAN UNTUK MENYELESAIKAN LEMPAR JAMRAH TERLEBIH DAHULU DAN KEMUDIAN MEMBAWA LANSIA TERSEBUT KE POSKO PETUGAS HAJI INDONESIA AGAR MENDAPAT PENANGANAN YANG TEPAT.

Endang Maria Astuti

Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI

Scan QR untuk berita selengkapnya



DAMPAK RUPIAH MAKIN TERPEROSOK!



Pelemahan nilai tukar rupiah sudah tembus ke level Rp16.400 terhadap dolar AS. Melemahnya rupiah bisa berdampak pada kenaikan harga barang hingga komoditas, terutama pada barang yang diimpor dari luar negeri.

Barang Elektronik



Harga *laptop*, *handphone*, hingga aksesoris akan mengalami kenaikan. Sebagian besar barang elektronik adalah barang impor.

Bahan pangan

Komoditas pangan seperti kedelai, jagung, bawang putih, dan gandum, diprediksi mengalami penyesuaian harga.



Produk energi

Produk yang berkaitan dengan energi seperti BBM, listrik, LPG nonsubsidi rentan mengalami penyesuaian harga karena kurs rupiah menjadi salah satu faktor yang berpengaruh.



Peralatan rumah tangga

Peralatan rumah tangga seperti AC, kulkas, TV, memiliki komponen yang masih banyak mengandalkan impor yang terpengaruh pelemahan nilai tukar.



"Pemerintah jangan cari kesempatan dari pelemahan nilai tukar rupiah ini untuk menaikkan harga BBM bersubsidi. Karena indikator objektif lain dalam pembentukan harga jual BBM bersubsidi masih positif,"

Mulyanto
Anggota Komisi VII DPR RI



sumber : CNN & CNBC

Bahas Katering Hingga Efisiensi Anggaran

Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI berencana membentuk Panitia Khusus (Pansus) Haji untuk mengevaluasi sejumlah kebijakan dalam penyelenggaraan ibadah haji 2024. Langkah ini diambil setelah Timwas Haji DPR RI melihat banyaknya kebijakan yang perlu diperbaiki guna meningkatkan kualitas pelayanan haji.

Anggota Timwas Haji DPR RI Diah Pitaloka, menyatakan bahwa Pansus Haji dibentuk untuk menangani berbagai aspek penting dalam manajemen haji, seperti kuota, anggaran, dan petugas haji.

“Ini bukan hanya sifatnya normatif. Banyak sekali yang sifatnya praktis (teknis). Misalnya manajemen kuota haji, manajemen petugas haji, manajemen keuangan haji. Sistem-sistem ini kita hampir tiap tahun, waktu (pembahasannya) sangat terbatas,” ujar Diah di Makkah, Arab Saudi, Jumat (14/6).

Diah menekankan bahwa dengan dibentuknya Pansus Haji,



FOTO: SKR/PDT

Anggota Timwas Haji DPR RI Diah Pitaloka, saat mengikuti pertemuan dalam rangka pengawasan haji 2024 di Makkah, Arab Saudi, Jumat (14/06/2024).

pendekatan yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan bisa

lintas sektor. Hal ini dikarenakan masalah kebijakan haji melibatkan antarkementerian dan instansi terkait. Ia berharap dengan adanya pansus, perbaikan yang dilakukan dapat lebih mendalam dan komprehensif.

“Untuk perubahan kebijakan, kita butuh masukan dari berbagai variabel dan ruang untuk penyelenggaraan haji. Bisa jadi masukan untuk Kemenlu dalam diplomasi. Kemendag, apa yang membuat makanan Indonesia kalah kompetisi dengan makanan impor. Masukan-masukan ini yang perlu kita telaah,” jelas Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.

skr/rdn

UNTUK PERUBAHAN KEBIJAKAN, KITA BUTUH MASUKAN DARI BERBAGAI VARIABEL DAN RUANG UNTUK PENYELENGGARAAN HAJI. BISA JADI MASUKAN UNTUK KEMENLU DALAM DIPLOMASI. KEMENDAG, APA YANG MEMBUAT MAKANAN INDONESIA KALAH KOMPETISI DENGAN MAKANAN IMPOR. MASUKAN-MASUKAN INI YANG PERLU KITA TELAHAH.

Diah Pitaloka

Anggota Timwas Haji DPR RI

Scan QR
untuk berita
selengkapnya



Sungai di Jambi Diduga Tercemar Merkuri

Anggota Komisi IV DPR RI Ihsan Yunus menyampaikan aspirasinya terkait permasalahan yang terjadi daerah bekas tambang di Indonesia, salah satunya yakni di provinsi Jambi. Ia menceritakan bahwa di daerah Jambi terdapat aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) dimana mereka membuang cairan sianida dan merkuri ke aliran Sungai.

Ia juga menduga akibat merkuri ini menyebabkan sejumlah masyarakat yang bertempat tinggal di Sungai tersebut terkena *down syndrome*. Untuk itu, ia meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk melakukan riset pada hulu Sungai di Jambi untuk membuktikan dugaan tersebut.

"Kalau sianida ditaruh di sungai itu bisa terurai, tapi kalau merkuri ini bertahan lama dan dia merusak secara permanen, baik itu biota sungainya maupun juga airnya. Maka kami mohon Ibu Menteri kalau memang masih ada anggaran, tolonglah dibuat riset itu, kita *enggak* bisa bergerak tanpa ada data," ujarnya dalam Rapat Kerja



Anggota Komisi IV DPR RI Ihsan Yunus.

Komisi IV dengan KLHK di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (13/6).

Pencemaran terhadap aliran

Sungai akibat aktivitas yang dilakukan PETI ini juga dicurigai Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu yang membuat 50-60 persen masyarakatnya yang tinggal disana terkena *down syndrome*. "Saya *kok* curiga banyak sekali generasi-generasi di bawah itu terutama yang bertempat tinggal di daerah PETI, yang makan dari situ, minum dari situ, itu banyak kena *down syndrome*," ungkapnya.

Senada dengan Ihsan, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Anggia Erma Rini juga menyetujui untuk KLHK segera melakukan tindakan riset terhadap aliran Sungai di Jambi tersebut. Hal ini menurutnya berbahaya jika dibiarkan karena menyangkut keberlanjutan generasi.

gal/aha

Scan QR untuk berita selengkapnya



KALAU SIANIDA DITARUH DI SUNGAI ITU BISA TERURAI, TAPI KALAU MERKURI INI BERTAHAN LAMA DAN DIA MERUSAK SECARA PERMANEN, BAIK ITU BIOTA SUNGAINYA MAUPUN JUGA AIRNYA. MAKA KAMI MOHON IBU MENTERI KALAU MEMANG MASIH ADA ANGGARAN, TOLONGLAH DIBUAT RISET ITU, KITA ENGGAK BISA BERGERAK TANPA ADA DATA.

Ihsan Yunus

Anggota Komisi IV DPR RI

Ratifikasi Protokol Komitmen Jasa Angkutan Udara

Komisi V DPR RI Bersama Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Perhubungan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Luar Negeri dan Menteri Perdagangan bersepakat untuk menyetujui ratifikasi protokol untuk melaksanakan Paket Kedua-belas Komitmen Jasa Angkutan Udara dalam persetujuan kerangka Kerjasama ASEAN di bidang jasa (*ASEAN Framework Agreement on Services/AFAS*) dalam bentuk Peraturan Presiden.

“Apakah protokol kedua belas jasa angkutan udara sebagaimana yang kita bahas pada hari ini yang diajukan Pemerintah kepada DPR dan Pimpinan DPR meminta Komisi V untuk membahasnya bersama Pemerintah, dapat kita setujui? Saya ketuk ya, Pemerintah setuju? Buat kita bersama setuju? Terima kasih, tepuk tangan buat kita semua,” ujar Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengetuk palu dalam Rapat Kerja yang dilaksanakan di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (19/6).

Selain itu, Komisi V DPR juga meminta Pemerintah untuk meningkatkan pengawasan terhadap



Ketua Komisi V DPR RI Lasarus saat memimpin Rapat Kerja yang dilaksanakan di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (19/06/2024).

implementasi pelaksanaan AFAS baik paket ke-9, ke-10, ke-11 dan ke-12 demi memberikan kepastian hukum dalam kerjasama dengan penyedia jasa, mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan serta daya

saing industri sub sektor jasa penunjang angkutan udara nasional dan mendorong pemulihan ekonomi dan industri pasca pandemi.

“Kita berharap Pemerintah mengawal seluruh keputusan ini secara baik karena pengawasan secara langsung itu sebetulnya ada di Pemerintah itu sendiri. Penerapan aturan ini nantinya tentu kami berharap seluruh ketentuan dalam protokol 9, 10, 11 dan 12 jasa angkutan udara untuk negara-negara di Asean ini betul-betul bisa kita kawal dengan baik dalam rangka memperkuat kita, keberadaan Indonesia di negara-negara Asean terkhusus di bidang angkutan udara,” jelas Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini. [gal/rdn](#)



KITA BERHARAP PEMERINTAH MENGAWAL SELURUH KEPUTUSAN INI SECARA BAIK KARENA PENGAWASAN SECARA LANGSUNG ITU SEBETULNYA ADA DI PEMERINTAH ITU SENDIRI.

Lasarus Ketua Komisi V DPR RI

Scan QR untuk berita selengkapnya



Pergantian Pejabat OIKN Tidak Akan Selesaikan Masalah

Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama menanggapi pergantian jabatan Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara (OIKN), yang saat ini dijabat oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (Plt Kepala OIKN) dan Wamen ATR/BPN Raja Juli Antoni (Plt Wakil Kepala OIKN). Menurutnya, IKN tetap sulit menarik minat investor, karena masalah utama bukan pada pergantian pejabatnya, tetapi dasar kebijakan yang sudah keliru sejak awal.

“Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebutkan sejumlah temuan pada mega proyek tersebut, diantaranya belum memadainya persiapan pembangunan infrastruktur IKN karena belum diterbitkannya hak pengelolaan lahan (HPL) seluas 2.0856 Ha,” ungkap pria yang akrab disapa SJP ini di Jakarta, Minggu (16/6).

Plt Kepala OIKN, kata SJP,



FOTO: AFR/PDI

Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama.

menyebut perlu ada Peraturan Presiden (Perpres) untuk penyelesaian

dengan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Plus atau PDSK Plus. Namun wakilnya meyakini, tidak perlu Perpres. Ini menunjukkan kegamangan Pemerintah dalam menjalankan kebijakan turunannya.

“Dengan banyaknya permasalahan tersebut, tentunya makin berat bagi OIKN untuk memenuhi ekspektasi Pemerintah dalam membidik investasi yang tinggi di IKN. Buktinya investasi yang masuk ke IKN baru Rp 47,5 triliun sejak 2023 hingga Januari 2024, sedangkan targetnya adalah Rp 100 triliun hingga akhir tahun ini,” terang Politisi Fraksi PKS ini.

IKN juga tidak dapat diharapkan mendongkrak perekonomian dan kesejahteraan masyarakat sebab masih menggunakan paradigma lama yaitu mendorong pembangunan yang bersifat sentralistik. **rdn**



DENGAN BANYAKNYA PERMASALAHAN TERSEBUT, TENTUNYA MAKIN BERAT BAGI OIKN UNTUK MEMENUHI EKSPEKTASI PEMERINTAH DALAM MEMBIDIK INVESTASI YANG TINGGI DI IKN. BUKTINYA INVESTASI YANG MASUK KE IKN BARU RP 47,5 TRILIUN SEJAK 2023 HINGGA JANUARI 2024, SEDANGKAN TARGETNYA ADALAH RP 100 TRILIUN HINGGA AKHIR TAHUN INI.

Suryadi Jaya Purnama

Anggota Komisi V DPR RI

Scan QR untuk berita selengkapnya



Merger Damri-PPD Tak Selesaikan Persoalan Keuangan

Perusahaan Umum (Perum) Damri dan Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta (PPD) resmi *merger* pada Juni 2023. Meskipun demikian, merger dua perusahaan transportasi tersebut, kini menimbulkan berbagai permasalahan. Di antaranya adalah temuan indikasi *fraud* oleh PPD senilai Rp23,19 miliar hingga utang Rp254,47 miliar.

Melihat kondisi *pascamerger* tersebut, Anggota Komisi VI DPR RI Harris Turino menilai penggabungan kedua perusahaan tersebut kurang tepat. Sebab, baik Perum Damri maupun PPD merupakan perusahaan yang tidak sehat secara keuangan perusahaan.

"Ini agak aneh kalau kemudian perusahaan yang tidak sehat harus menyelamatkan perusahaan yang sakit. Saya coba memahami dari tadi



FOTO: OJI/PPD

Anggota Komisi VI DPR RI Harris Turino saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI dengan Perum Damri, di Gedung Nusantara I, DPR RI Senayan, Jakarta, Selasa (11/6/2024).

masih susah untuk mengerti," kata Harris Turino, pada Rapat Dengar

Pendapat (RDP) Komisi VI dengan Perum Damri, di Gedung Nusantara I, DPR RI Senayan, Jakarta, Selasa (11/6).

Seharusnya, lanjut Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini, sebelum dilakukan *merger*, kedua perusahaan tersebut melakukan perbaikan dulu di masing-masing perusahaan. Terutama, penanganan permasalahan yang terjadi di PPD. Sehingga, akan ada sinergi yang baik antara keduanya setelah digabungkan.

"Karena kalau tidak (ada perbaikan terlebih dahulu) ya masalah Bu. Konsep penggabungan atau *merger* kan seharusnya *value creation*. Yang namanya *merger* itu satu ditambah satu sama dengan tiga, karena ada sinergi yang muncul," jelas Harris.

[bia/rdn](#)



SEHARUSNYA, SEBELUM DILAKUKAN MERGER, KEDUA PERUSAHAAN TERSEBUT MELAKUKAN PERBAIKAN DULU DI MASING-MASING PERUSAHAAN. TERUTAMA, PENANGANAN PERMASALAHAN YANG TERJADI DI PPD. SEHINGGA, AKAN ADA SINERGI YANG BAIK ANTARA KEDUANYA SETELAH DIGABUNGAN.

Harris Turino

Anggota Komisi VI DPR RI

Scan QR untuk berita selengkapnya



Legislator Pertanyakan Sinergi BUMN Farmasi

Kinerja *Holding* BUMN Farmasi (konsolidasi) pada 2023 berdasarkan laporan keuangan *un-audited* yang dipaparkan Direktur Utama PT Bio Farma (Persero) Shadiq Akasya, diperkirakan akan mengalami tekanan dari segi profitabilitas. Kondisi ini, diungkapkan Shadiq, akibat menurunnya kinerja dua anggota holding BUMN Farmasi yakni PT Kimia Farma Tbk dan PT Indofarma Tbk.

Melihat penurunan kinerja *holding* BUMN Farmasi tersebut, Anggota Komisi VI DPR RI Amin AK mempertanyakan sinergitas antara tiga BUMN Farmasi. Ia mengatakan, adanya *holding* seharusnya meningkatkan efisiensi dan meningkatkan kinerja masing-masing BUMN dengan kerja sama dan sinergi yang dijalin.

“Apakah *enggak* ada sinergi? Bungkusnya *aja holding* tapi masih jalan sendiri-sendiri. Malah mungkin bahkan satu *ngalor* satu *ngidul*, satu *ngetan* satu *ngulon*. *Enggak* ada sinergi di dalamnya, apakah seperti itu? Tentu ini harus kita kritik,” ujar Amin dalam RDP dengan *Holding*



FOTO: GER/PDI

Anggota Komisi VI DPR RI Amin AK saat mengikuti RDP dengan Holding BUMN Farmasi di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (19/6/2024).

BUMN Farmasi di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (19/6).

Terlebih, menurut Amin, masa pandemi Covid-19 seharusnya menjadi momentum baik bagi

industri farmasi. Sebab, banyaknya permintaan akan obat-obatan yang seharusnya dapat meningkatkan kinerja dan laba perusahaan farmasi. Namun, hal tersebut sayangnya tidak terjadi pada *Holding* BUMN Farmasi yang ada.

“(Saat pandemi covid) untuk BUMN Farma mestinya ini musim panen raya pak, ada permintaan berbagai macam produk khususnya yang terkait dengan covid ya *macem-macem lah*. Mestinya kinerjanya meningkat pesat, labanya me-ningkat pesat, tinggi *gitu loh*. Tapi yang terjadi *kok malah* menurun drastis ini di luar apa yang terjadi dengan *fraud* itu,” lanjut Politisi Fraksi PKS ini.

— **bia/aha**



(SAAT PANDEMI COVID) UNTUK BUMN FARMA MESTINYA INI MUSIM PANEN RAYA PAK, ADA PERMINTAAN BERBAGAI MACAM PRODUK KHUSUSNYA YANG TERKAIT DENGAN COVID YA *MACEM-MACEM LAH*. MESTINYA KINERJANYA MENINGKAT PESAT, LABANYA MENINGKAT PESAT, TINGGI *GITU LOH*. TAPI YANG TERJADI *KOK MALAH* MENURUN DRASTIS INI DI LUAR APA YANG TERJADI DENGAN *FRAUD* ITU.

Amin AK

Anggota Komisi VI DPR RI

Scan QR untuk berita selengkapnya



Biaya Pemulihan Terus Naik, Lifting Migas Turun

Komisi VII DPR RI mempertanyakan peningkatan *cost recovery* dari tahun ke tahun yang tidak dibarengi oleh kenaikan *lifting* minyak dan gas bumi (migas). Bahkan *lifting* migas tersebut cenderung terus menurun.

“Pemulihan biaya dari tahun 2022 ke 2023 terjadi peningkatan dari USD6,1 miliar ke USD9,6 miliar, atau sekitar 58 persen. Begitupun dari tahun 2023 ke 2024 yang diproyeksikan akan menghabiskan USD13,9 miliar. Sementara sejak 3 tahun *lifting* kita turun terus tapi biayanya naik terus, dan itu tadi diakui Pak Wiko bahwa produksinya turun. Maka, saya ingin mendapat penjelasan lebih detail terkait hal tersebut,” ujar Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Bambang Hariyadi di, Jakarta, Kamis (6/6/2024).

Hal senada juga diungkapkan oleh Anggota Komisi VII DPR RI Abdul Kadir Karding. Pihaknya mempertanyakan *cost recovery* yang terus naik dari tahun ke tahun, namun tidak dibarengi dengan peningkatan kinerja, yakni hasil *lifting* Migas yang tidak signifikan.



FOTO: GER/PDT

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Bambang Hariyadi saat memimpin Rapat Dengar Pendapat dengan SKK Migas dan Wakil Dirut PT Pertamina, di ruang rapat Komisi VII, Senayan, Jakarta, Kamis (6/6/2024).

Lebih lanjut Politisi Fraksi PKB ini menduga ada semacam modus tertentu untuk terus menaikkan *cost*

recovery dengan melakukan lobi-lobi khusus, yang mungkin hanya menguntungkan seseorang atau individu saja. Jika memang itu terjadi, dan ada kerugian negara di dalamnya, maka Karding menilai hal itu sangat berbahaya, dan harus segera dialami dan dilakukan evaluasi.

“Menurut saya ini harus diperjelas kenapa, kan logikanya kalau tunjangan kinerja naik, kan kerjanya mesti bagus *dong*. Kalau *cost recovery* ini naik, mestinya *lifting* kita juga naik *dong*, dan naiknya tidak sedikit. Naiknya terus, itu yang disebut kinerja. Kalau ini bukan kinerja,” ungkap Karding.

ayu/aha

“**SEMENTARA SEJAK 3 TAHUN *LIFTING* KITA TURUN TERUS TAPI BIAYANYA NAIK TERUS, DAN ITU TADI DIAKUI PAK WIKO BAHWA PRODUKSINYA TURUN. MAKA, SAYA INGIN MENDAPAT PENJELASAN LEBIH DETAIL TERKAIT HAL TERSEBUT.**”

Bambang Hariyadi

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI

Scan QR untuk berita selengkapnya



Bagi-bagi IUPK ke Ormas, Pemerintah Sembarangan Kelola ESDM

Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto kritik keras kebijakan Pemerintah membagikan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) kepada ormas keagamaan. Kebijakan tersebut menurutnya sebagai tanda bahwa Pemerintah tidak taat aturan atau sembarangan dalam mengurus sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Lebih lanjut Politisi Fraksi PKS ini menilai Pemerintah semakin hari, semakin *ngawur* dalam mengelola sektor ESDM. Seenaknya saja melanggar peraturan dengan cara membuat penafsiran sendiri tentang UU Mineral dan Batu Bara (UU Minerba).

“Coba itu Pak Bahlil (Menteri Investasi) bagi-bagi IUPK untuk ormas. Padahal, kalau kita baca seksama UU Minerba, izin pertambangan itu diajukan badan usaha paling tidak koperasi. Pemerintah akal-akalan mengatur norma bahwa badan usaha yang sahamnya dimiliki ormas secara mayoritas. Itu *kan* norma baru yang tidak ada dalam UU,” ujar Mulyanto



FOTO: FHN/PDI

Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto saat mengikuti Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri ESDM Arifin Tasrif, Rabu (5/6/2024).

dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri ESDM Arifin Tasrif, Rabu (5/6).

Mulyanto menilai, terkait IUPK,

seharusnya mengacu pada ketentuan UU No 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara (Minerba), dimana penawaran IUPK terhadap wilayah pertambangan yang telah dikembalikan kepada Negara diprioritaskan untuk BUMN/BUMD bukan untuk badan usaha swasta, apalagi ormas.

“Yang luar biasa lagi, Ormas akan diprioritaskan untuk mendapatkan IUPK. Padahal Kalau kita baca undang-undang, yang namanya prioritas tegas-tegas itu diberikan kepada BUMN/BUMD. Selain lembaga-lembaga tersebut IUPK diberikan melalui proses lelang,” tambahnya.

pun/aha



COBA ITU PAK BAMLIL (MENTERI INVESTASI) BAGI-BAGI IUPK UNTUK ORMAS. PADAHAL, KALAU KITA BACA SEKSAMA UU MINERBA, IZIN PERTAMBANGAN ITU DIAJUKAN BADAN USAHA PALING TIDAK KOPERASI. PEMERINTAH AKAL-AKALAN MENGATUR NORMA BAHWA BADAN USAHA YANG SAHAMNYA DIMILIK ORMAS SECARA MAYORITAS. ITU KAN NORMA BARU YANG TIDAK ADA DALAM UU.

Mulyanto

Anggota Komisi VII DPR RI

Scan QR
untuk berita
selengkapnya



Beasiswa untuk Mahasiswa Keluarga Kelas Menengah

Anggota Komisi X DPR RI Ratih Megasari Singkarru meminta pemerintah mempertimbangkan kembali struktur Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang saat ini tengah berlaku. Menurutnya, model pembiayaan UKT dapat dieksplorasi menjadi lebih adil, tidak hanya meringankan beban bagi keluarga yang tidak mampu tetapi juga bagi keluarga kelas menengah yang memiliki lebih dari satu anggota keluarga yang mengenyam pendidikan tinggi.

"Sebenarnya yang kelas menengah ini adalah kelompok yang terka-dang kita *missed*. Jadi mereka *tuh kan* posisinya nangung. Miskin tidak, kaya juga tidak, tapi tanggungannya juga banyak," kata Ratih dalam Rapat Kerja Komisi X di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (13/6).

Politisi Fraksi P-NasDem ini bahkan mengusulkan adanya beasiswa bagi mahasiswa dari keluarga menengah. "Karena prestasi itu *kan* tidak melulu sebenarnya untuk yang tidak mampu tapi sebenarnya



Anggota Komisi X DPR RI Ratih Megasari Singkarru saat mengikuti Rapat Kerja Komisi X di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (13/6/2024).

yang di kelas menengah inilah sasaran utamanya. Yang tadi saya bilang mereka ini ada di kelompok

di tengah-tengah. Jadi tolong perhatiannya juga untuk kelompok yang kelas menengah ini," kata Ratih.

Lebih lanjut, Ratih juga mengungkapkannya juga memahami kekhawatiran yang muncul di masyarakat terkait isu kenaikan UKT di tahun depan. Ratih menegaskan bahwa pihaknya mendorong kebijakan pendidikan yang inklusif dan juga berkelanjutan.

"Memastikan bahwa setiap siswa-siswi kita itu memiliki akses, tidak peduli dengan latar belakang ekonomi mereka seperti apa yang penting mereka memiliki akses ke pendidikan tinggi yang berkualitas tanpa beban finansial yang berlebihan," pungkasnya. **we/aha**

KARENA PRESTASI ITU KAN TIDAK MELULU SEBENARNYA UNTUK YANG TIDAK MAMPU TAPI SEBENARNYA YANG DI KELAS MENENGAH INILAH SASARAN UTAMANYA. YANG TADI SAYA BILANG MEREKA INI ADA DI KELOMPOK DI TENGAH-TENGAH. JADI TOLONG PERHATIANNYA JUGA UNTUK KELOMPOK YANG KELAS MENENGAH INI.

Ratih Megasari Singkarru
Anggota Komisi X DPR RI

Scan QR untuk berita selengkapnya



Percepat Rilis BPS dengan Teknologi Informasi

Badan Pusat Statistik akan segera merilis angka kemiskinan terbaru hasil Survei Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2024 pada 1 Juli 2024 mendatang. Anggota Komisi XI DPR RI, Gus Irawan Pasaribu meminta agar BPS dapat mengoptimalkan digitalisasi agar lebih cepat dalam merilis hasil survei dan sensus yang menjadi produk instansi tersebut.

“Di era digitalisasi sekarang, saya kira mestinya semua kegiatan, pekerjaan sampai ke *output*-nya itu bisa dilakukan lebih cepat ya. Tadi ada diinformasikan Ibu Plt (BPS), untuk angka kemiskinan per Maret tapi baru akan diumumkan satu Juli,” ujar Gus Irawan saat menghadiri Rapat Kerja Komisi XI di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (13/6).

Meski begitu, Politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut tetap memberikan apresiasi pada BPS lantaran sudah lebih cepat dalam melakukan perilisan jika



Anggota Komisi XI DPR RI, Gus Irawan Pasaribu saat mengikuti Rapat Kerja Komisi XI di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (13/6/2024).

dibandingkan dengan waktu-waktu sebelumnya. Namun, Gus Irawan tetap berpegang bahwa dengan digitalisasi hampir semua proses

bisa dilakukan menggunakan sistem sehingga seharusnya bisa membuat pekerjaan jauh lebih cepat.

“Apa yang dibutuhkan ya? Perasaan saya *sih* karena ini sudah digitalisasi *gitu* ya rasanya proses itu *kan by system* bisa dilakukan *gitu*. Memang sudah jauh lebih cepat dari waktu-waktu sebelumnya tapi rasanya karena kemajuan teknologi sudah bisa buat lebih cepat,” ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Plt. Kepala BPS menjelaskan bahwa kegiatan survei untuk Susenas di Maret 2024 baru diselenggarakan pada Maret dan April, sedangkan pengolahan data dan validasi dilakukan pada April hingga Juni 2024.

uc/rdn

“
APA YANG DIBUTUHKAN YA? PERASAAN SAYA SIH KARENA INI SUDAH DIGITALISASI GITU YA RASANYA PROSES ITU KAN BY SYSTEM BISA DILAKUKAN GITU. MEMANG SUDAH JAUH LEBIH CEPAT DARI WAKTU-WAKTU SEBELUMNYA TAPI RASANYA KARENA KEMAJUAN TEKNOLOGI SUDAH BISA BUAT LEBIH CEPAT.

Gus Irawan Pasaribu

Anggota Komisi XI DPR RI

Scan QR untuk berita selengkapnya



Jangan Hanya Terpusat di Jawa dan Sumatera

Pulau Jawa dan Sumatera disinyalir masih menjadi penyumbang terbesar bagi capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia. Anggota Komisi XI DPR RI, Marwan Cik Asan menilai harus ada strategi khusus agar mampu mendongkrak kontribusinya, terlebih selama ini telah dilakukan pembangunan secara masif di berbagai daerah.

“Ini kan sudah ada peta dan target pertumbuhan wilayah tahun 2025 sampai dengan tahun 2029. Saya masih sedih saja karena setelah 10 tahun begitu banyak program yang kita gelontorkan untuk mendistribusikan kemajuan pembangunan, ternyata setelah kita lihat dari tabel ini bahkan pun nanti sampai dengan tahun 2029 pertumbuhan ekonomi kita masih terpusat di Jawa dan pulau Sumatera,” kata Marwan saat



FOTO: MUN/PDT

Anggota Komisi XI DPR RI, Marwan Cik Asan saat mengikuti rapat dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas, Senayan, Jakarta pada Kamis (13/6/2024).

rapat dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas, Senayan, Jakarta pada Kamis (13/6).

Dari proyeksi Bappenas yang dibacakan oleh Marwan, hingga tahun 2029 Pulau Jawa dan Sumatera masih jadi kontributor terbesar dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kontribusi Pulau Jawa diperkirakan akan menyentuh porsi hingga 54,5 persen dan pulau sumatera di kisaran 22,3 persen.

Marwan lantas menyinggung pembangunan yang dilakukan di kawasan Papua. Disampaikannya, pemerintah sudah membuat program untuk kawasan tersebut tapi kontribusinya pada pertumbuhan ekonomi masih belum mampu menggeser Jawa maupun Sumatera. Untuk itu, Marwan minta Bappenas memberikan perhatian terhadap hal ini terutama pada saat penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2024-2029. **uc/aha**



INI KAN SUDAH ADA PETA DAN TARGET PERTUMBUHAN WILAYAH TAHUN 2025 SAMPAI DENGAN TAHUN 2029. SAYA MASIH SEDIH SAJA KARENA SETELAH 10 TAHUN BEGITU BANYAK PROGRAM YANG KITA GELONTORKAN UNTUK MENDISTRIBUSIKAN KEMAJUAN PEMBANGUNAN, TERNYATA SETELAH KITA LIHAT DARI TABEL INI BAHKAN PUN NANTI SAMPAI DENGAN TAHUN 2029 PERTUMBUHAN EKONOMI KITA MASIH TERPUSAT DI JAWA DAN PULAU SUMATERA.



Marwan Cik Asan Anggota Komisi XI DPR RI

Scan QR untuk berita selengkapnya



HADIR

SENIN-JUMAT

08.00-20.00 WIB

REFRENSI INDONESIA

OBJEKTIF • KOMPREHENSIF • TERPERCAYA •

TNP
PARLEMEN



SAKSIKAN HANYA DI

<https://tvrparlemen.dpr.go.id/>



Atau Scan QR Code ini: